

LAPORAN TAHUNAN TA 2024

Badan Kebijakan Transportasi
Jl. Medan Merdeka Timur No.5
<https://baketrans.kemenuhub.go.id/>
tel:+622134833060

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

PROFIL PIMPINAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

A. KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.



Lahir di Palembang pada tanggal 29 Juni 1979. Memulai karir di Kelurahan Serasan Jaya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Lurah Serasan pada Tahun 2004 kemudian melanjutkan karir dan berpindah ke Kementerian Perhubungan pada Tahun 2019 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Pada tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan 01 Januari

2024, beliau pernah menjadi Dewan Komisaris PT. Pelindo Marine Service. Saat ini, beliau mendapatkan penugasan juga sebagai Dewan Komisaris PT. Djakarta Lloyd terhitung sejak 17 Januari 2024 sampai dengan sekarang. Akhir Tahun 2022 sampai dengan Akhir Tahun 2023 beliau diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan sebelum pada akhirnya bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi sejak 06 November 2023 sampai dengan sekarang.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan yaitu Sekolah Dasar Yaktapena Palembang (1991), Sekolah Menengah Pertama YKKP 1 Palembang (1994), Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Palembang (1997). Diploma IV STPDN Jatinangor (2001), Pasca Sarjana (S2) di Universitas Setyagama Jakarta (2004), dan menyelesaikan gelar doktoralnya (S3) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta (2021). Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 2000, Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 2013, dan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun 2020.

B. SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M



Lahir di Jakarta pada tanggal 20 November 1965. Memulai karir menjadi Kepala Bandar Udara Kelas IV Kalimantan Tanjung Redep (2005), Kepala Bandar Udara Kelas II Kalimantan Tanjung Redep (2008), Kepala Subdirektorat Operasi Pesawat Udara Dit. Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (2010), Kepala Subdirektorat Operasi Pesawat (2011), Kepala Balai Kesehatan Penerbangan (2014), Kepala Kantor Otoritas Bandara Kls II Wilayah IV Minangkabau (2015),

Kepala Balai Kesehatan Penerbangan (2017), Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (2018), Kepala Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (2019), Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (2020), Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (2022), bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Oktober 2023 dan sampai dengan saat ini (Desember 2024) menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Mesin di IKIP Bandung dan menyelesaikan S2 di STM IMMI, Surabaya. Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 2000, Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun 2012 dan Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun 2020.

C. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI

Suranto, A.TD., M.T.



Lahir di Semarang pada tanggal 25 April 1968. Memulai karir menjadi Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (25-07-2016), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat (26-06-2019 s.d 10-06-2022), Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan (10-06-2022 s.d 20-09-2022), Direktur Sarana Perkeretaapian (04-04-

2023 s.d 20-06-2024), Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi (20-06-2024 s.d Sekarang).

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Diploma IV/ DIV Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi Tahun 1994 dan Strata 2/ S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2002. Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 2003, Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun 2019 dan Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun 2021.

D. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

Capt. Novyanto Widadi, S.A.P., M.M



Lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1968. Memulai karir menjadi Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (02-11-2016 s.d 12-12-2019) kemudian bergabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Udara (20-12-2019 s.d 2022) dan sampai saat ini (Desember 2024) beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan

Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Trans portasi. Selain itu, beliau menjabat juga sebagai Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong (2023 s.d Sekarang).

Beliau memiliki latar belakang pendidikan D4 Akademi Angkatan Udara Jakarta (1990), Strata 1/ S1 Universitas Terbuka Malang (1999) dan Strata 2/ S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – ISM Tangerang (2017). Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu Prestasi Istimewa peringkat IV dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI (21) Tahun 2019, Prestasi Istimewa peringkat IV dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan L (50) Tahun 2021. Aktif mengikuti event lari marathon 42 Km yaitu Maybank 2023, Borobudur 2023, BFI 2024 dan Sydney 2024.

E. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Marwanto Heru Santoso, S.T., M.T.



Lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Maret 1970. Memulai karir menjadi Kepala Balai LLAJSDP Palu (19-04-2012 s.d 20-08-2015), kemudian menjabat Eselon II sebagai Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (29-07-2020 s.d 19-11-2020), Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan (19-11-2020 s.d 26-07-2021) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (26-07-2021 s.d 23-10-2023), Kepala Distrik Navigasi

Kelas 1 Ambon (23-10-2023 s.d 21-06-2024) dan bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan (21-06-2024 s.d Sekarang).

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Strata 1/ S1 Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 1995 dan Strata 2/ S2 Institut Teknologi Bandung Tahun 2004. Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 2008 dan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun 2018.

F. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
Jumardi, S.T., M.T



Lahir di Wajo Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 06 Maret 1969. Memulai karir menjadi Staf Penyelenggara Diklat, Pusdiklat Hubud (06-11-1998), Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan Setditjen KA (13-05-2008), Kasubag Program, Setditjen KA(23-12-2010), Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen KA (11-12-2014), Kepala Balai Teknik Kelas II Wilayah Sumatera Barat (18-02-2015), Kepala Sub Direktorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api (2016), Kepala Sub Direktorat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA Direktorat Prasarana Perkeretaapian (11-01-2016), Kepala Sub Direktorat Jalur dan Bangunan KA Direktorat Prasarana Perkeretaapian (10-06-2016), Kepala Sub Direktorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api (02-05-2018), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten (05-11-2018), Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Dit. Kepelabuhan (26-06-2019), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur (12-12-2019), Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sul-Sel (08-04-2021), Direktur Prasarana BPTJ (30-09-2021), Kepala Biro Umum (12-08-2022), dan bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (07-03-2023 s.d Sekarang). Beliau memiliki latar belakang pendidikan Strata 1/ S1 Teknik Mesin Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 1993, Strata 2/ S2 Institut Teknologi Bandung Tahun 2003 dan Profesi Insinyur Universitas Gadjah Mada Tahun 2019 Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun 2008 dan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun 2018.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit satuan kerja yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, serta Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per Desember Tahun 2024 adalah sebanyak 284 pegawai, terdiri dari 262 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, Badan Kebijakan Transportasi hadir sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsive. Program dan Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebanyak 64 (enam puluh lima) Rekomendasi Kebijakan. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi. Realisasi IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi yaitu sebesar 61,46 (Indeks) dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 65 (Indeks) yang berarti bahwa realisasi tersebut sedikit dibawah target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 94,56%. Realisasi IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan) yaitu sebesar 100% dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 90% yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 111,11%. Realisasi IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2) yaitu sebesar 35,13% dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 32% yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 109,79%. Realisasi IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan menggunakan nilai Tahun 2023 yaitu sebesar 85,26 (Indeks) dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 80,5 (Indeks) yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 105,91%. Secara umum, Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 telah mencapai target. Adapun rata-rata Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebesar 105,34%.

Adapun realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 sebesar Rp 188.043.279.980 (95,72%) dari pagu total dan (99,40%) dari pagu efektif dengan rincian realisasi per jenis belanja adalah sebagai berikut: belanja barang sebesar Rp 139.746.630.921 (94,61%), belanja pegawai sebesar Rp41.488.904.048 (98,93%) dan belanja modal sebesar Rp6.807.745.011 (99,95%). Selama Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan 2 penghargaan yaitu Anugerah Keterbukaan

Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi.

Hasil monitoring pelaksanaan pemberian tugas belajar sampai dengan Semester II Tahun 2024, tercatat sebanyak 23 (dua puluh tiga) pegawai Badan Kebijakan Transportasi sedang melaksanakan tugas belajar. Selain tugas belajar, pada tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi telah menyelenggarakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam 11 (sebelas) pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di luar Badan Kebijakan Transportasi atau diselenggarakan oleh instansi/ *stakeholder* lainnya. Kegiatan tugas belajar dan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan Strategis Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Glorifikasi Sektor Transportasi Darat yaitu “Sistem Transportasi Darat Indonesia yang Terintegrasi, cerdas, dan Berkelanjutan : Sudahkan menghubungkan Indonesia?”;
- b. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Badan Kebijakan Transportasi dengan tema : “Inovasi Kebijakan Transportasi Nasional : Merespons Dinamika Mobilitas dan Teknologi Masa Depan”;
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) “Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum”
- d. *Expert Talk* dengan tema “Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024”

Kerja sama Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Padjajaran;
- b. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Airlangga;
- c. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Andalas;
- d. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Diponegoro;
- e. Badan Kebijakan Transportasi dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI);
- f. Badan Kebijakan Transportasi dengan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

SAMBUTAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia - NYA, sehingga Buku Laporan Tahunan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 telah selesai disusun. Buku Laporan Tahunan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 berisikan gambaran Sumber Daya Manusia, Program Kerja, Pelaksanaan Kegiatan, Capaian Kinerja serta Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diuraikan berdasarkan unit organisasi di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Informasi-informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi pada Tahun 2024. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kebutuhan informasi bagi masyarakat maupun khalayak yang berkepentingan di bidang transportasi.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Hidayah - NYA kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kita masing-masing di masa mendatang.

KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19790629 199802 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PROFIL PIMPINAN i

RINGKASAN EKSEKUTIF v

SAMBUTAN..... vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

BAB I PROFIL BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi 1

B. Visi dan Misi 1

C. Organisasi dan Tata Kelola 2

D. Profil Sumber Daya Manusia (SDM) 2

E. Sejarah..... 5

BAB II KILAS KINERJA 2024 7

A. Arah Kebijakan dan Strategi..... 7

B. Ringkasan Laporan Keuangan 32

C. Penghargaan..... 33

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 36

A. Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 36

B. Pengadaan CASN (CPNS, Pola Pembibitan dan PPPK Tahun 2024)..... 41

BAB IV KEGIATAN STRATEGIS..... 43

A. Glorifikasi Sektor Transportasi Darat 43

B. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Badan Kebijakan Transportasi..... 44

C. Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum” 45

D. Expert Talk dengan tema “Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024” 46

BAB V KETERLIBATAN STAKEHOLDER 48

A. Kerjasama Bilateral/ Regional/ Internasional/ Multilateral 48

BAB VI PENUTUP 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi	2
Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.....	3
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Analisis Kebijakan.....	4
Gambar 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	4
Gambar 1. 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Gambar 1. 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	5
Gambar 2. 1 Persentase Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	31
Gambar 2. 2 Grafik Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	33
Gambar 2. 3 Dokumentasi Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024	34
Gambar 2. 4 Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi	35
Gambar 3. 1 Website CASN Kementerian Perhubungan	42
Gambar 4. 1 Dokumentasi Glorifikasi Sektor Transportasi Darat	44
Gambar 4. 2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Teknis Badan Kebijakan Transportasi	45
Gambar 4. 3 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) dengan judul "Evaluasi Kebijakan Standar pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum"	46
Gambar 4. 4 Dokumentasi Expert Talk dengan tema "Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024"	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.....	3
Tabel 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi	8
Tabel 2. 2 Rekomendasi Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	31
Tabel 3. 1 Kedudukan Pegawai yang Mengajukan Permohonan Tugas Belajar.....	36
Tabel 3. 2 Kedudukan Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar	36
Tabel 3. 3 Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Status Tugas Belajar Tahun 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	37
Tabel 3. 4 Pelatihan di Internal Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	39
Tabel 3. 5 Pelatihan di Luar Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	40

BAB I PROFIL BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Sedangkan fungsi Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;
4. Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2022-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Penyelenggaraan serangkaian proses analisis perumusan kebijakan bidang transportasi yang antisipatif dan responsif merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan yang kemanfaatannya memiliki nilai strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset

Kebijakan Transportasi yang berkualitas, antisipatif dan responsif, maka ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan transportasi secara holistik, integratif, tematik, spasial (HITS);
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge based policy*);
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi;
5. Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

C. Organisasi dan Tata Kelola

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit satuan kerja yang disusun berdasarkan pendekatan fungsi, yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi

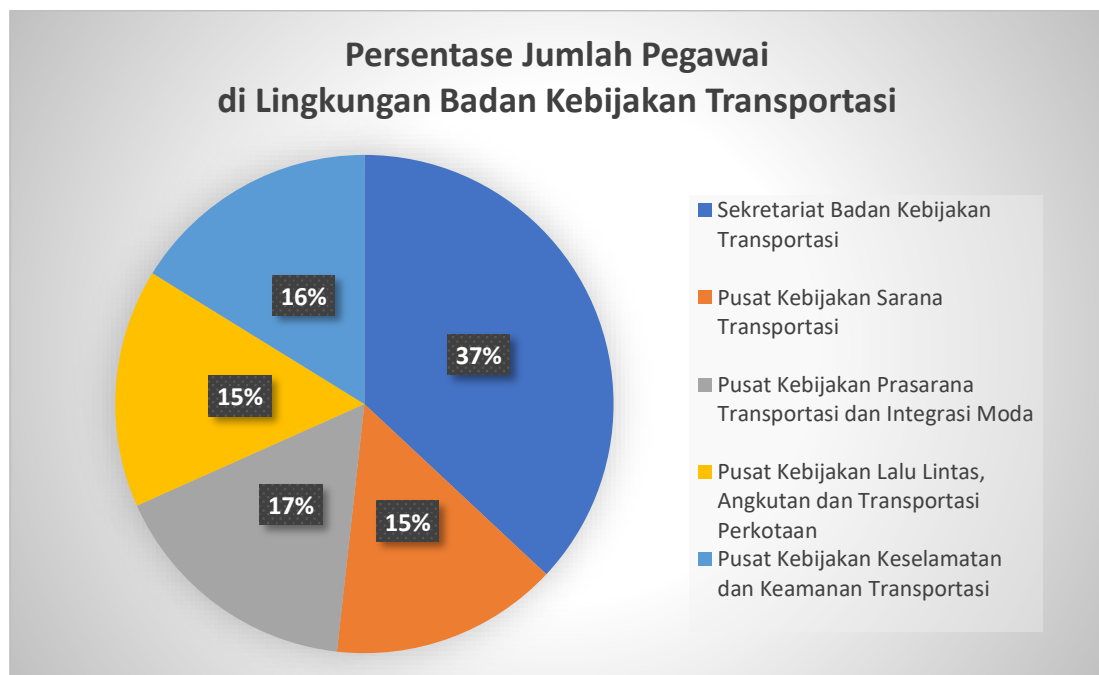
D. Profil Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Kebijakan Transportasi memandang bahwa salah satu modal strategis dalam upaya peningkatan kinerja organisasi adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per Desember Tahun 2024 adalah sebanyak 284 pegawai, terdiri dari 262 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para Aparatur Sipil

Negara tersebut terbagi ke dalam 5 (lima) unit kerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

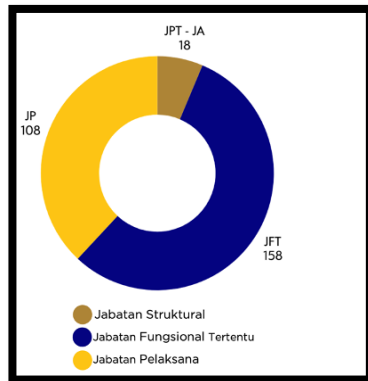
No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	105
2	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	42
3	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	47
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	44
5	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	46
Total		284



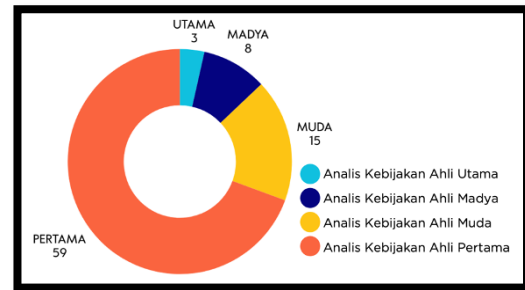
Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya dengan tingkat Eselon I. Pada masing-masing Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama dengan tingkat Eselon II. Total secara keseluruhan jumlah pejabat struktural di Badan Kebijakan Transportasi adalah sebanyak 18 termasuk Pejabat Tinggi Madya/ Eselon I. Seluruh Jabatan Struktural di Badan Kebijakan Transportasi terisi oleh 18 (6.3%) Pejabat Struktural Eselon I s.d III. Sedangkan, sebesar 38% (108 pegawai) menduduki Jabatan Pelaksana dan sebesar 55.6% (158 pegawai)

merupakan Pejabat Fungsional Tertentu, yang didominasi oleh Jabatan Analis Kebijakan yaitu 85 pegawai. Sebagai kekuatan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi, terdapat 3 orang (3.5%) Analis Kebijakan Ahli Utama, 8 orang (9.4%) Analis Kebijakan Ahli Madya, 15 orang (17.6%) Analis Kebijakan Ahli Muda, dan 59 orang (69.4%) Analis Kebijakan Ahli Pertama. Di samping itu, hingga akhir tahun 2024 masih terdapat pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang tengah berproses untuk menjadi Analis Kebijakan, memperkuat kekuatan organisasi dalam pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

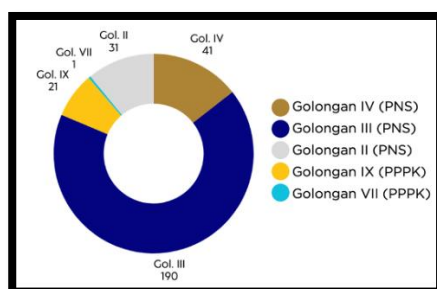


Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

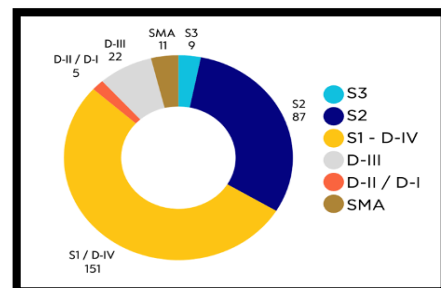


Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Analis Kebijakan

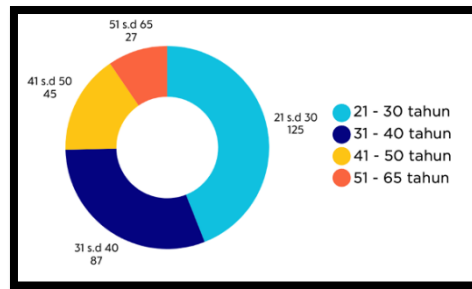
Komposisi pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S3 adalah sejumlah 9 orang (3.2%), S2 sejumlah 87 orang (30.5%), S1/D-IV sejumlah 151 orang (53%), D3 sejumlah 22 orang (7.7%), D-II/D-I sejumlah 5 orang (1.8%), dan SLTA/SMK mencapai 11 orang (3.9%). Badan Kebijakan Transportasi secara berkelanjutan mendorong pegawainya untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan melanjutkan pendidikannya, dimana hingga akhir tahun 2024 terdapat 22 pegawai yang tengah menjalani tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai merupakan PNS yang menduduki golongan III (190 pegawai), diikuti oleh pegawai yang menduduki golongan IV (41 pegawai).



Gambar 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 1. 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1. 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan jenjang usia, terdapat sebanyak 27 pegawai (9.5%) yang berusia 51 s.d 65 tahun, 45 pegawai (15.8%) yang berusia 41 s.d 50 tahun, 87 pegawai (30.6%) yang berusia 31 s.d 40 tahun, dan 125 pegawai (44%) yang berusia 21 s.d 30 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan SDM Badan Kebijakan Transportasi didominasi oleh pegawai generasi Y (Milenial) dan Z. Sedangkan berdasarkan gender, pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan komposisi yang seimbang antara pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing berjumlah 142 pegawai.

E. Sejarah

Badan Kebijakan Transportasi merupakan organisasi perubahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan. Berdasarkan arahan Menteri Perhubungan di tahun 2020 bahwa dalam rangka menyikapi kebijakan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengintegrasikan seluruh kegiatan penelitian instansi pemerintah, maka Badan Litbang Perhubungan diarahkan untuk bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

Perubahan organisasi Badan Kebijakan Transportasi dilaksanakan secara bertahap sejak pengusulan awal di tahun 2020 sampai dengan ditetapkan pada bulan Januari di tahun 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. Selanjutnya struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berbeda dengan Badan Litbang Perhubungan dengan lingkup pekerjaan utama adalah penelitian, pelaksanaan pekerjaan Badan Kebijakan Transportasi berfokus pada analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Output organisasi Badan Kebijakan Transportasi adalah rekomendasi kebijakan bidang transportasi dalam bentuk naskah kebijakan dengan pengampu kinerja utama organisasi, yaitu pejabat fungsional analisis kebijakan. Pelaksanaan pekerjaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi diawali dengan penyusunan agenda setting yang berangkat dari

arahan direktif Menteri Perhubungan, perkembangan dinamika isu transportasi, inisiatif strategis sebagai turunan dari agenda prioritas nasional.

Struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi disusun menggunakan pendekatan fungsi bukan pendekatan moda seperti struktur organisasi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan isu strategis antar moda dimana fasilitas dan pelayanan transportasi khususnya pada zona transisi haruslah *seamless* dalam satu kesisteman layanan secara fisik maupun teknologi.

Di samping hal tersebut dengan pendekatan fungsi diharapkan dapat memudahkan Badan Kebijakan Transportasi dalam menyusun formulasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan tepat guna pada 7 (tujuh) objek utama sebagai output kebijakan sektor transportasi, yaitu pelayanan (konektivitas), sarana, prasarana, keselamatan, operasional (lalu lintas dan angkutan), kelembagaan (sdm dan organisasi) dan pembiayaan pembangunan serta tarif.

BAB II KILAS KINERJA 2024

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran program Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024 meliputi:

1. Arah kebijakan dan strategi implementasi dalam pencapaian Sasaran Program (SP1) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi, meliputi:
 - a. Arah Kebijakan (AK1) Peningkatan rumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana dengan 8 strategi implementasi;
 - b. Arah Kebijakan (AK2) Peningkatan rumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana pendukung major project RPJMN dengan 11 strategi implementasi;
 - c. Arah Kebijakan (AK2) Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan transportasi dengan 5 strategi implementasi.
2. Arah kebijakan dan strategi implementasi dalam pencapaian Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, meliputi:
 - a. Arah Kebijakan (AK4) Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, dengan 2 strategi implementasi;
 - b. Arah Kebijakan (AK5) Peningkatan efektivitas manajemen kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dengan 3 strategi implementasi.

Tabel 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
SP1 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Transportasi	AK1 Peningkatan Rumusan Kebijakan Bidang sarana dan prasarana	STR1 kebijakan pembangunan transportasi bidang sarana transportasi	Perumusan kebijakan di bidang sarana sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Perumusan kebijakan pemanfaatan Bus High Deck sebagai sarana angkutan barang ; • Perumusan kebijakan pembukaan Amo berbasis potential demand dan mekanisme Mutual Recognition Arrangement; • Perumusan kebijakan strategi Indonesia dalam menghadapi pra audit IMO/Imsas; • Perumusan kebijakan kepemilikan pesawat udara dalam bisnis penerbangan; • Perumusan kebijakan pemeriksaan sarana perkeretaapian uji tak rusak (non Destructive Testing); • Analisa Kebijakan Bidang Sarana Transportasi; • Direktif Menteri Perhubungan Bidang Sarana Transportasi (termasuk evaluasi kemanfaatan program pembangunan sarana transportasi).
		STR2 kebijakan pembangunan transportasi bidang prasarana transportasi dan integrasi moda	Perumusan kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Perumusan kebijakan penentuan kriteria bandar udara pengumpul dan pengumpan (hub and spoke) untuk optimalisasi dan penguatan jaringan transportasi udara; • Evaluasi kebijakan mekanisme slot time penerbangan; • Penyusunan rekomendasi pengembangan akses jalur kereta api menuju elabuhan dan bandara;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Perumusan kebijakan implementasi dryport untuk distribusi komoditas kopi di Provinsi Aceh; • Analisa Kebijakan Bidang Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda; • Direktif Menteri Perhubungan Bidang Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda (termasuk evaluasi kemanfaatan program pembangunan prasarana dan fasilitas integrasi moda); • Skema kebijakan pengendalian untuk utilisasi infrastruktur yang efektif dan efisien; • Pedoman kebijakan teknis intergrasi moda untuk keselamatan dan keamanan pengguna; • Kebijakan integrasi moda dan informal untuk perluasan konektivitas dan aksesibilitas layanan transportasi; • Kebijakan penguatan konektivitas hinterland dan aksesibilitas antar moda angkutan kontainer dari dan ke pelabuhan utama Indonesia; • Sinergi dan koordinasi utilisasi sarana pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum utama nasional di sejumlah wilayah WPP utama Indonesia; • Fasilitas integrasi moda dalam simpul transportasi guna memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan Penumpang dalam meningkatkan kepuasan pelanggan/customer satisfaction; • Konektivitas dan aksesibilitas pada perencanaan prasarana simpul transportasi; • Integrasi angkutan penumpang dan barang pada operasional first dan last mile di Perkotaan; • Penentuan hirarki prasarana integrasi transportasi di area dan non-area perkotaan;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Pengembangan rest area jalan tol sebagai transfer hub transportasi regional; • Integrasi kebijakan keselamatan jalan perkotaan dan transportasi berkelanjutan melalui hierarki hazard control; • Peran integrasi antara arus barang dan angkutan berbasis rel dalam memberi layanan transportasi di aglomerasi perkotaan; • Perumusan kebijakan pembangunan halte transisi berdasarkan demand di sekitar pusat kegiatan; • Kebijakan proses integrasi sistem handling arus barang di wilayah Kawasan Timur Indonesia; • Perumusan kebijakan skema integrasi moda antara angkutan massal dengan transportasi lokal; • Pedoman teknis keselamatan dan keamanan dalam integrasi moda; • Evaluasi pelayanan pelabuhan utama dalam mendukung kebijakan tol laut; • Evaluasi pelayanan pelabuhan pengumpul dalam mendukung kebijakan tol laut; • Evaluasi pelayanan pelabuhan pengumpan dalam mendukung kebijakan tol laut; • Modernisasi dan digitalisasi pelabuhan sebagai international Hub Port dan Nasional Hub Port • Pengembangan kawasan ekonomi dengan konsep seaport city berbasis transportasi laut; • Pengembangan sumberdaya kewilayahan untuk optimalisasi distribusi logistik; • Pengembangan transportasi dalam mendukung ekowisata, wisata bahari, dan geopark;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Pengelolaan kawasan TOD (transit oriented development) berbasis simpul moda rel; • Evaluasi kebijakan penyelenggaraan bandara dengan konsep KONSESI di Indonesia (Labuan Bajo, Batam); • Evaluasi kebijakan terhadap pembangunan bandar udara yang dilaksanakan oleh swasta (unsolicited); • Pengelolaan kawasan international Hub Port City pada pelabuhan komersial tinggi; • Pengelolaan kawasan National Hub Port City pada Pelabuhan Komersial Menengah; • Pembangunan jalur dan stasiun kereta api dengan konsep KONSESI; • Perumusan kebijakan mendorong multi operator dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; • Evaluasi kebijakan multi operator dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian; • Proyeksi kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan prasarana transportasi modern; • Evaluasi kapasitas terpasang pelabuhan penyeberangan merak dan bakauheuni; • Penetapan dan pola pengembangan bandara hub khusus kargo; • Penentuan Standar/Kriteria terminal Penumpang untuk layanan penerbangan LCC; • Pengembangan Bisnis Penerbangan khususnya Industri MRO yang berimbang di wilayah Barat & Timur Indonesia.

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
		STR3 kebijakan pembangunan transportasi bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan	Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Analisa kebijakan penerapan electronic ticketing terintegrasi pada transportasi umum berbasis nomor induk kependudukan; • Analisa potensi pola pergerakan masyarakat (angkutan lebaran, natal dan tahun baru); • Evaluasi pengaturan angkutan dan tarif kargo di Indonesia; • Analisa Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan Dan Transportasi Perkotaan; • Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan Dan Transportasi Perkotaan; • Penyusunan rekomendasi optimalisasi dan integrasi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis dan PSO kereta api; • Penyusunan kebijakan tarif angkutan barang maupun penumpang; • Penyusunan kebijakan jalur distribusi untuk mewujudkan transportasi logistic yang efisien dan kompetitif; • Pemetaan pergerakan Asal-Tujuan (skala nasional) angkutan penumpang maupun barang; • Penyusunan kebijakan penyelenggaraan transportasi perkotaan (tatanan regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan sistem transportasi); • Konsep pengembangan layanan transportasi yang terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata; • Kebijakan pengembangan transportasi di wilayah batas negara dalam mendukung peningkatan mobilitas dan perekonomian masyarakat;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang dalam mendukung efisiensi biaya logistik; • Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestik; • Pemutakhiran data untuk analisis perumusan kebijakan transportasi dalam rangka memfasilitasi demand pergerakan orang dan barang serta memperbaiki perangkat transportasi; • Skema pembiayaan dan kebutuhan regulasi Dalam Pengoperasian transportasi alternatif di wilayah Ibukota Negara (IKN); • Pola kerjasama ekonomi kelembagaan baru antara kawasan Ibukota Negara (IKN) dan daerah penyangga untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas; • Kesiapan infrastruktur pendukung dan regulasi untuk meningkatkan mobilitas wisatawan menuju destinasi wisata; • Pengembangan layanan angkutan perintis untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah 3TP; • Kebijakan pengembangan transportasi dan distribusi logistik di wilayah 3TP; • Kebijakan digital trucking untuk meningkatkan efisiensi dan mobilitas sektor logistik; • Pengembangan sinergi kebijakan angkutan umum dengan moda transportasi Lokal (Kearifan Lokal); • Pengembangan angkutan feeder transportasi umum di wilayah Aglomerasi yang ramah lingkungan; • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi pada saat Natal Tahun Baru dan Angkutan lebaran;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Standar Pelayanan Minimum transportasi alternatif perkotaan di wilayah Ibukota Negara (IKN); • Kebijakan penataan transportasi logistik perkotaan berbasis Connected, Shared, Autonomous dan E-Commerce; • Skema pengembangan kebijakan kelembagaan transportasi di wilayah Metropolitan dalam menghadapi tantangan aglomerasi kota; • Peningkatan pengelolaan/manajemen transportasi untuk mendukung Smart City pada kota besar dan metropolitan; • Rencana kebijakan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi; • Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massal; • Kebijakan strategi shifting/pengalihan penggunaan angkutan pribadi ke penggunaan angkutan massal.
		STR4 kebijakan pembangunan transportasi bidang keselamatan dan keamanan transportasi	Perumusan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Evaluasi kebijakan penindakan berat muatan angkutan barang melalui penerapan jembatan timbang; • Evaluasi kebijakan pembangunan transportasi untuk menopang kedaulatan dan keamanan Negara; • Evaluasi kebijakan standar keselamatan dan keamanan angkutan penumpang dan barang; • Penyusunan standar marka optikal serong pada jalan tol; • Direktif Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan Dan Keamanan Transportasi (termasuk evaluasi kemanfaatan program peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi);

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan Dan Keamanan Transportasi; • Perumusan regulasi waktu kerja dan tempat istirahat pengemudi; • Analisis kebijakan peningkatan kompetensi pengemudi bus dan truk; • Penyusunan mekanisme pengawasan implementasi rancang bangun pada perusahaan karoseri; • Evaluasi implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada Perusahaan Angkutan Umum; • Analisis fungsi SMK sebagai alat screening ketersediaan regulasi pada aspek keselamatan; • Evaluasi peran dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam penyelenggaraan keselamatan jalan di daerah; • Analisis faktor jalan yang tidak berkeselamatan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas; • Analisis pembatasan akses pada jalan sekitar pusat kegiatan masyarakat; • Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dalam menurunkan fatalitas dan kejadian kecelakaan menonjol (lakajol) di Indonesia; • Evaluasi rute pengangkutan batu bara berdasarkan pada kelas jalan; • Analisis penyediaan fasilitas difabel yang berkeselamatan pada transportasi perkotaan; • Identifikasi faktor penyebab kecelakaan pada pengguna sepeda motor; • Optimalisasi SPIONAM dalam meningkatkan aspek keselamatan; • Evaluasi implementasi rekomendasi keselamatan dari hasil investigasi KNKT dan TARC; • Analisis pemberlakuan alat pengawasan awak kendaraan pada bus;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Analisis implementasi alat pembatas kecepatan kendaraan; • Evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian di Pulau Sumatera; • Evaluasi pengawasan internal pada pengoperasian sarana dan prasarana kereta api; • Evaluasi regulasi tata cara pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian; • Implementasi Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO); • Evaluasi SOP perawatan sarana dan prasarana yang mengacu pada Standar Nasional atau Internasional; • Analisis backlog pada perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian; • Penyusunan RPM penetapan kelas jalur kereta api, untuk menetapkan kelas jalur pada jaringan jalur kereta api eksisting di tiap jalur lintas kereta api eksisting; • Penyelarasan klasifikasi tata cara pengangkutan BBM dengan kereta api barang; • Analisis risiko pada bangunan jembatan jalur kereta api menggunakan metode Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA); • Evaluasi Grade of Automation (GoA) 3 pada pengoperasian LRT yang mengacu pada RAMS menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA); • Standarisasi spesifikasi teknis komponen perkeretaapian; • Analisis rumaja dan ruwasja sebagai buffer zone (sempadan) jalur kereta api; • Upaya peningkatan keselamatan pengoperasian perkeretaapian; • Analisis implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) disesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Peningkatan pengawasan navigasi pelayaran terhadap kejadian human error; • Regulasi manajemen risiko kebakaran di sarana pelayaran; • Pengawasan spesifikasi teknis pembuatan kapal di Galangan Perusahaan Kapal; • Evaluasi Implementasi penerapan SOP pelayanan kapal penyeberangan; • Evaluasi kebutuhan peraturan terkait pengoperasian kapal dengan motor tempel (outboard engine); • Evaluasi peraturan terkait penanganan kondisi darurat di kapal; • Sistem Manajemen Keselamatan terkait penilaian risiko dan panduan kerja yang selamat; • Penyusunan standar pemeliharaan kapal negara kenavigasian; • Integrasi dan harmonisasi aturan di Bidang Penerbangan Nasional untuk peningkatan pemahaman dan penyederhanaan praktik oleh personil penerbangan; • Penyusunan Pedoman Pengawasan oleh Inspektur Penerbangan; • Analisis pengaturan kelembagaan dan sistem pengelolaan State Safety Program (SSP) untuk mendukung program Keselamatan Penerbangan Nasional; • Implementasi Performance Based Navigation (PNB) dalam peningkatan Keselamatan Penerbangan Nasional; • Penyusunan mekanisme pengawasan implementasi Safety Management System (SMS) oleh penyedia jasa di bidang penerbangan; • Inovasi metode pemeriksaan kesehatan personil penerbangan sebagai upaya untuk lebih memberikan jaminan keselamatan penerbangan;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Evaluasi syarat dan ketentuan pemenuhan kebutuhan suku cadang pesawat udara untuk mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan; • Mitigasi faktor human error dalam kecelakaan penerbangan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelatihan dan sertifikasi personil penerbangan; • Analisis Pengaturan Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan State Safety Program (SSP) untuk Mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional; • Analisis mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam hal terjadinya penyimpangan prosedur penerbangan oleh personil penerbangan; • Harmonisasi pengaturan Safety Management System (SMS) Internasional ke dalam Hukum Penerbangan Nasional; • Evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam peraturan perundangundangan di bidang penerbangan untuk meningkatkan efektifitas implementasi Safety Security Program (SSP); • Strategi penguatan budaya keselamatan penerbangan dalam penerbangan nasional; • Re-identifikasi, sosialisasi dan pengaturan hazard baru dalam dunia penerbangan nasional pasca pandemi; • Strategi mitigasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur oleh operator penerbangan.
		STR5 perumusan NSPK transportasi bidang jalan dan integrasi moda	Perumusan NSPK di bidang jalan dan integrasi moda sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Perumusan NSPK sarana kendaraan listrik untuk operasional kendaraan dinas;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Perumusan NSPK sarana kendaraan listrik untuk angkutan umum; • Perumusan NSPK tarif dan subsidi angkutan jalan; • Perumusan NSPK integrasi moda di simpul transportasi; • Perumusan NSPK pemeriksaan dan audit sarana kendaraan; • Review Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
		STR6 perumusan NSPK transportasi bidang perkeretaapian	Perumusan NSPK di bidang perkeretaapian sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Perumusan NSPK prasarana perkeretaapian; • Perumusan NSPK sarana perkeretaapian; • Perumusan NSPK mitigasi bencana alam di bidang prasarana dan sarana perkeretaapian; • Perumusan NSPK pengoperasian sarana dan prasarana perkeretaapian pasca bencana alam; • Perumusan NSPK pelayanan, tarif , subsidi bidang perkeretaapian; • Perumusan NSPK penatausahaan BMN dan pengelolaan PNBK perkeretaapian; • Perumusan NSPK penyelenggaraan angkutan dan kelembagaan perkeretaapian; • Review PM 32 Tahun 2011 tentang Standar dan tata cara Perawatan Prasarana perkeretaapian terkait perbaikan fungsi jalur yang disebabkan oleh rel patah.

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
		STR7 perumusan NSPK transportasi bidang pelayaran	Perumusan NSPK di bidang pelayaran sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Perumusan NSPK ketentuan standar teknologi sarana dan prasarana perkapalan; • Perumusan NSPK industri perkapalan nasional; • Perumusan NSPK operasional angkutan laut; • Perumusan NSPK tarif dan subsidi angkutan laut; • Perumusan NSPK keselamatan, keamanan pelayaran; • Perumusan NSPK kenavigasian dan pelayaran antar negara; • Perumusan NSPK pelayanan dan kelembagaan bidang pelayaran; • Perumusan NSPK penatausahaan BMN dan pengelolaan PNBp pelayaran; • Revisi PM 25 Tahun 2011 tentang sarana bantu Navigasi Pelayaran.
		STR8 perumusan NSPK transportasi bidang penerbangan	Perumusan NSPK di bidang penerbangan sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Perumusan NSPK penetapan bandara internasional transit hub; • Perumusan NSPK simpul industri pusat perawatan; • Perumusan NSPK perencanaan keselamatan dan keamanan penerbangan; • Perumusan NSPK tarif dan subsidi angkutan udara; • Perumusan NSPK pengendalian pola operasi penerbangan sipil; • Perumusan NSPK penatausahaan BMN dan pengelolaan PNBp penerbangan; • Perumusan NSPK pengaturan klasifikasi Bandar udara; • Perumusan NSPK pengaturan pengembangan kawasan Bandar udara.
	AK2 Peningkatan	STR9 Pengembangan rumusan kebijakan	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan sistem transportasi Ibu Kota Negara yang meliputi :

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
	Rumusan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pendukung Major Project RPJMN	perencanaan sistem transportasi Ibukota Negara (IKN)	• Perumusan kebijakan rencana implementasi Autonomous Rail Rapid Transit di Ibukota Negara (IKN); • Perumusan kebijakan mekanisme intensif penggunaan teknologi ramah lingkungan; • Analisis kebijakan rencana implementasi penyelenggaraan integrasi pentarifan transportasi umum di Ibukota Negara (IKN); • Penyusunan rekomendasi kebijakan jaringan sistem sarana dan prasarana transportasi laut di Ibukota Negara (IKN); • Penyusunan rekomendasi kebijakan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) penggunaan Augmented Reality dalam keselamatan pelayaran di Ibukota Negara (IKN); • Perumusan kebijakan penyelenggaraan angkutan umum penumpang dan barang dikawasan Ibukota Negara (IKN); • Kebijakan standar fasilitas integrasi moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibukota Negara (IKN) guna pencapaian KPI Transportasi di Ibukota Negara; • Penyusunan standard bandara internasional berbasis metropolis di Ibukota Negara (IKN); • Arsitektur cerdas jalur dan simpul transportasi zero emission di Ibukota Negara (IKN); • Kebijakan pengembangan Transport Demand Management dalam mendukung keberlanjutan pengoperasian kereta Api regional di Wilayah Ibukota Negara (IKN);

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			Kebijakan pengembangan jaringan rute setiap moda ke Ibukota Negara (IKN) untuk mendukung pergerakan orang dan barang di wilayah Ibukota Negara (IKN).
		STR10 Transportasi Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Yang Dikembangkan	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan transportasi terkait pengembangan Kawasan wisata super prioritas, diantaranya : - Perumusan kebijakan pengembangan dan perluasan konektivitas transportasi dalam mendukung sektor pariwisata (KSPN); - Perumusan kebijakan prasarana transportasi terintegrasi dalam mendukung sektor pariwisata (KSPN); - Perumusan kebijakan pembinaan perusahaan angkutan pariwisata; - Perumusan kebijakan penyelenggaraan angkutan pariwisata yang berkeselamatan.
		STR11 Transportasi Di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal Dan Perbatasan (3TP) Yang Dikembangkan	Perumusan kebijakan mendukung pengembangan transportasi di Kawasan 3TP, diantaranya : - Perumusan kebijakan strategi optimalisasi load factor angkutan laut perintis; - Perumusan kebijakan skema subsidi dan komponen biaya keberintisan PELNI; - Evaluasi penyelenggaraan keberintisan angkutan udara; - Analisis kebijakan implementasi remote tower di bandara wilayah 3T (terluar, Tertinggal, Terdepan); - Perumusan kebijakan kriteria, skema subsidi dan komponen biaya angkutan keberintisan pelayaran, penerbangan dan angkutan darat; - Perumusan kebijakan grand desain penyelenggaraan keberintisan angkutan penyeberangan, pelayaran, penerbangan dan angkutan darat;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			- Perumusan kebijakan evaluasi kemanfaatan penyelenggaraan keperintisan angkutan transportasi; - Perumusan kebijakan pengembangan konektivitas jaringan, prasarana dan sarana transportasi di kawasan terluar, terdepan, tertinggal dan perbatasan.
		STR 12 Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar)	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan sistem transportasi di bidang sarana transportasi, prasarana transportasi, integrasi moda, lalu lintas, angkutan serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi terkait pengembangan wilayah Metropolitan Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar.
		STR13 Sistem Transportasi Pendukung Logistik Yang Dikembangkan	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan transportasi terkait pengembangan sistem transportasi pendukung logistik, diantaranya : - Perumusan kebijakan strategi pembiayaan dan optimalisasi sarana angkutan tol laut; - Perumusan kebijakan dukungan infrastruktur pelabuhan di kawasan ekonomi khusus (KEK); - Penyusunan rekomendasi kebijakan jalur logistik di Indonesia Untuk mendukung food estate dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); - Perumusan kebijakan strategi optimalisasi load factor angkutan tol laut; - Perumusan kebijakan strategi konektivitas mendak disparitas harga; - Perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengendalian angkutan logistik nasional; - Perumusan kebijakan rekomendasi jalur lalu lintas logistik nasional di Indonesia
		STR14 Penyelenggaraan	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan transportasi mendukung penyelenggaraan kereta api kecepatan tinggi pulau Jawa, diantaranya melalui :

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
		Kereta Api Kecepatan Tinggi Pulau Jawa	• Penyusunan rekomendasi pengoperasian kereta api cepat di Indonesia; • Perumusan kebijakan penyusunan standar teknis rolling stock untuk kebutuhan angkutan penumpang dan perawatan sarana kereta api cepat; • Perumusan kebijakan dukungan pembiayaan skema penyertaan modal negara (PMN); • Perumusan kebijakan strategi kebijakan penyelesaian cost overrun; • Perumusan kebijakan tarif dan PSO (strategi ketahanan bisnis angkutan kereta api cepat); • Perumusan kebijakan mitigasi keselamatan operasi Kereta Api Cepat; • Perumusan kebijakan strategi pemenuhan SDM teknis dengan kualifikasi khusus (terkait operasi dan perawatan Kereta Api cepat).
		STR15 Pengembangan Wilayah Batam-Bintan	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan pembangunan transportasi dan sistem transportasi di bidang sarana transportasi, prasarana transportasi, integrasi moda, lalu lintas, angkutan serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi terkait pengembangan Wilayah Batam-Bintan.
		STR16 Peningkatan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar)	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah kota metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar : • Perumusan kebijakan terkait angkutan massal pada kawasan Aglomerasi di Indonesia; • Analisis kebijakan pembentukan badan usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; • Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan kereta api perkotaan; • Perumusan kebijakan strategi Integrasi angkutan penumpang pada pembangunan kereta api ringan (Light Rail Train);

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Perumusan kebijakan strategi peningkatan demand penumpang pada pembangunan kereta api ringan (Light Rail Train); • Perumusan kebijakan skema pembiayaan Mass Rapid Transit (MRT) di Kawasan Jabodetabek; • Perumusan kebijakan strategi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) terintegrasi dengan pengembangan kawasan (TOD); • Perumusan kebijakan strategi mitigasi penerapan teknologi baru pada pembangunan kereta api ringan (Light Rail Train); • Perumusan kebijakan strategi mitigasi penerapan teknologi baru pada pembangunan Mass Rapid Transit (MRT); • Pengembangan jaringan, simpul dan integrasi pelayanan angkutan massal di kawasan perkotaan; • Perumusan kebijakan sistem manajemen pengelolaan dan pengusahaan angkutan massal di kawasan perkotaan; • Perumusan kebijakan pelayanan angkutan umum berbasis online.
		STR17 Penyelenggaraan Kereta Api Makassar ParePare	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di bidang sarana transportasi, prasarana transportasi, integrasi moda, lalu lintas, angkutan serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi terkait penyelenggaraan Kereta Api Makassar Pare-Pare.
		STR18 Pengembangan Kota Baru (Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Sorong)	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di bidang sarana transportasi, prasarana transportasi, integrasi moda, lalu lintas, angkutan serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi terkait Pengembangan 4 (Empat) Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Sorong.

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
		STR19 Peningkatan pelayanan pergerakan pada Libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Dukungan analisis dan perumusan kebijakan penyelenggaraan transportasi pada masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru, diantaranya : • Perumusan kebijakan manajemen lalu lintas angkutan pada Libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru; • Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian operasional angkutan pada Libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
	AK3 Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan transportasi	STR20 Koordinasi rumusan kebijakan bidang sarana transportasi	Koordinasi rumusan kebijakan bidang sarana transportasi sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Koordinasi perencanaan strategis dan pemetaan isu/agenda mapping bidang sarana transportasi; • Penyelenggaraan konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan bidang sarana transportasi; • Dukungan harmonisasi rancangan kebijakan bidang sarana transportasi; • Pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang sarana transportasi; • Peningkatan kendali mutu analisa kebijakan bidang sarana transportasi.
		STR21 Koordinasi rumusan kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda	Koordinasi rumusan kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Koordinasi perencanaan strategis dan pemetaan isu/agenda mapping bidang prasarana transportasi dan integrasi moda; • Penyelenggaraan konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda; • Dukungan harmonisasi rancangan kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;

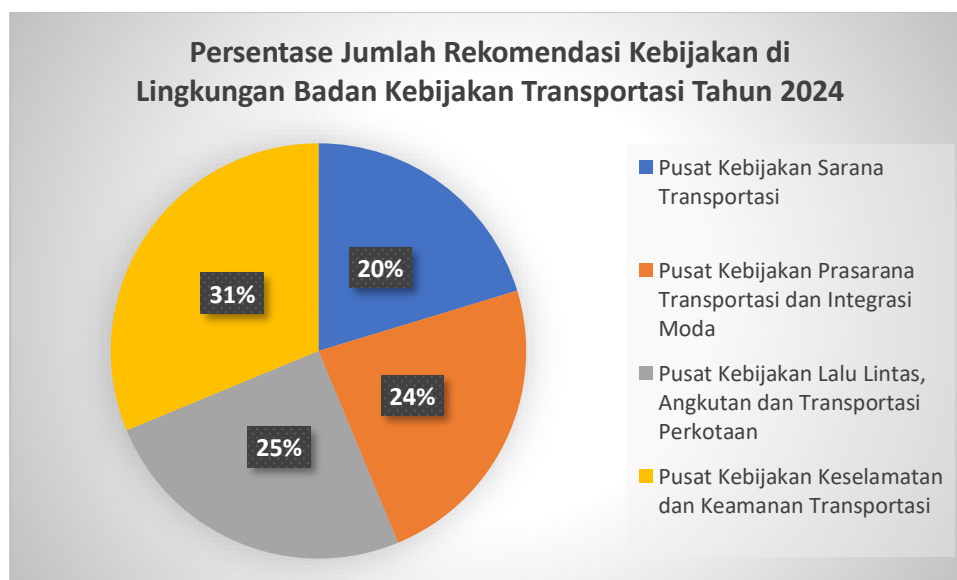
Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda; • Peningkatan kendali mutu analisa kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda.
		STR22 Koordinasi rumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan	Koordinasi rumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Koordinasi perencanaan strategis dan pemetaan isu/agenda mapping bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan; • Penyelenggaraan konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan; • Dukungan harmonisasi rancangan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan; • Pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan; • Peningkatan kendali mutu analisa kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan transportasi perkotaan.
		STR23 Koordinasi rumusan kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi	Koordinasi rumusan kebijakan bidang sarana transportasi sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Koordinasi perencanaan strategis dan pemetaan isu/agenda mapping bidang keselamatan dan keamanan transportasi; • Penyelenggaraan konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi; • Dukungan harmonisasi rancangan kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi; • Peningkatan kendali mutu analisa kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
		STR24 Koordinasi lintas bidang	Koordinasi rumusan kebijakan lintas bidang sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya : • Koordinasi perencanaan sistem transportasi wilayah Ibukota Negara baru; • Koordinasi pengendalian internal perumusan kebijakan; • Monitoring dan evaluasi penyiapan rancangan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Penyelenggaraan layanan aplikasi E-survey dalam rangka mendukung survey strategis Badan Kebijakan Transportasi; • Penyelenggaraan pengelolaan layanan perpustakaan dan publikasi jurnal transportasi.
SP2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	AK4 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	STR25 Pengelolaan dan penguatan organisasi dan sumber daya manusia riset kebijakan	• Penyelenggaraan kegiatan strategis bidang SDM dan kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi; • Reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Penataan organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; • Pengelolaan kegiatan konseling pegawai; • Pengembangan motivasi pegawai; • Penyelenggaraan kegiatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia aparatur analis kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
			• Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Penyusunan standar kompetensi jabatan.
		STR26 Pengelolaan keuangan dan BMN	• Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Kebijakan Transportasi; • Peningkatan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Peningkatan administrasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (e-monitoring) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.
	AK5 Peningkatan efektivitas manajemen kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	STR27 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	• Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara terintegrasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Penguatan sistem e-performance untuk penilaian kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.
		STR28 Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja di	• Penguatan penerapan SPIP di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Penerapan zona integritas di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Kegiatan Strategis
		Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	
		STR29 Pelaksanaan sistem informasi, hukum dan kehumasan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	• Pengembangan sistem informasi dan TIK administrasi dan teknis di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi; • Penguatan manajemen data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan monitoring isu strategis bidang transportasi; • Peningkatan layanan kepastakaan, publikasi dan kehumasan; • Pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, Badan Kebijakan Transportasi hadir sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsive. Program dan Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebanyak 64 (enam puluh lima) Rekomendasi Kebijakan ditunjukkan secara persentase sebagaimana diagram berikut:



Gambar 2. 1 Persentase Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

Salah satu program Badan Kebijakan Transportasi yaitu program infrastruktur konektivitas yang digunakan untuk menjalankan fungsi strategis perumusan kebijakan eksisting maupun inisiasi baru dan kegiatan percepatan implementasi kebijakan. Adapun rincian Jumlah Rekomendasi Kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Rekomendasi Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

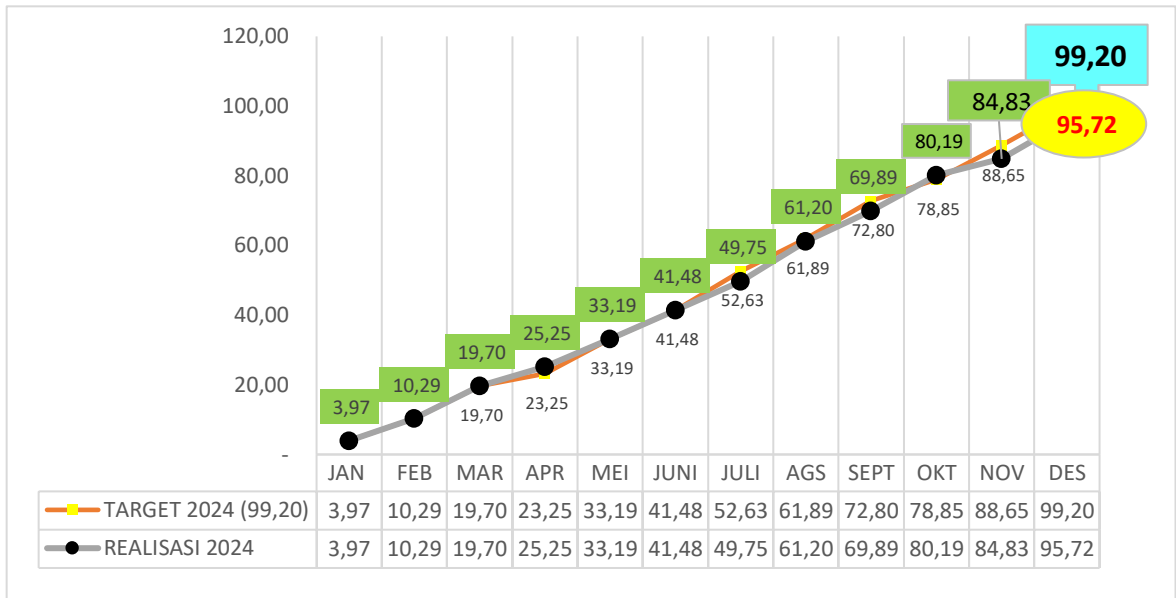
No.	Satuan Kerja	Jumlah Rekomendasi
1	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	13
2	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	15
3	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	16
4	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	20
Total		64

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi. Realisasi IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi yaitu sebesar 61,46 (Indeks) dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 65 (Indeks) yang berarti bahwa realisasi tersebut sedikit dibawah target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 94,56%. Realisasi IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan) yaitu sebesar 100% dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 90% yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 111,11%. Realisasi IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2) yaitu sebesar 35,13% dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 32% yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 109,79%. Realisasi IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan menggunakan nilai Tahun 2023 yaitu sebesar 85,26 (Indeks) dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 80,5 (Indeks) yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 105,91%. Secara umum, Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 telah mencapai target. Adapun rata-rata Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebesar 105,34%.

B. Ringkasan Laporan Keuangan

Pagu awal Badan Kebijakan Transportasi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp196.457.340.000,00 dan terdapat Blokir AA (Automatic Adjustment) sebesar Rp5.931.360.000,00 dan Blokir Anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp1.338.939.000,00 sehingga posisi DIPA Akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp189.187.041.000,00.

Adapun realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 sebesar Rp 188.043.279.980 (95,72%) dari pagu total dan (99,40%) dari pagu efektif dengan rincian realisasi per jenis belanja adalah sebagai berikut: belanja barang sebesar Rp 139.746.630.921 (94,61%), belanja pegawai sebesar Rp41.488.904.048 (98,93%) dan belanja modal sebesar Rp6.807.745.011 (99,95%). Berikut ini merupakan grafik target dan realisasi anggaran tahun 2024:



Gambar 2. 2 Grafik Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

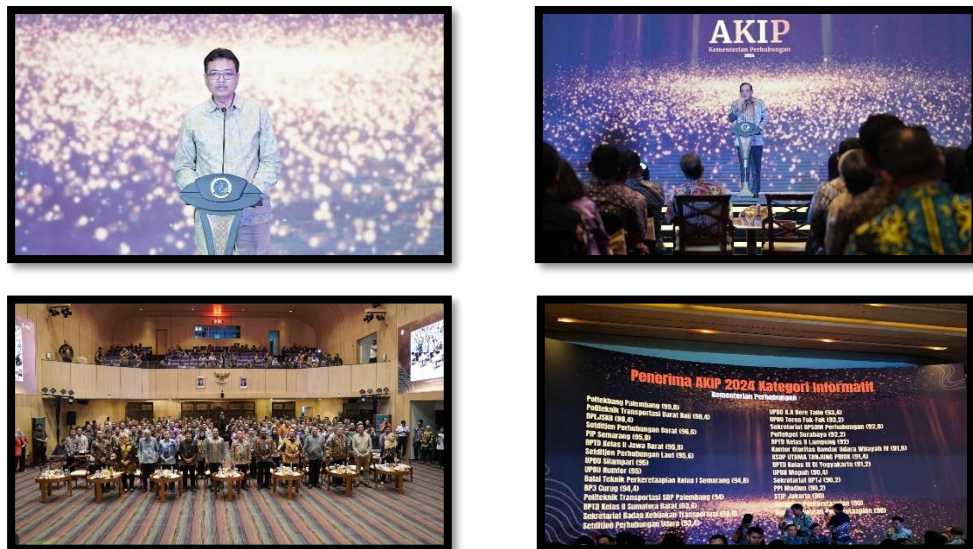
C. Penghargaan

Beberapa capaian keberhasilan Badan Kebijakan Transportasi dalam rangka menunjang Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Transportasi di Tahun 2024 antara lain:

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024

Pada hari Rabu, 11 Desember 2024 bertempat di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan (Jl. Medan Merdeka Barat No.8) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi mendapat Kategori Informatif dengan Nilai 93,6 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024.





Gambar 2. 3 Dokumentasi Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, bersama ini disampaikan bahwa untuk mengukur kualitas kinerja belanja dan untuk mewujudkan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/ L perlu diselenggarakan penilaian dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penilaian IKPA digunakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi belanja K/ L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/ L dan Pemberian penghargaan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$;
- Kurang apabila nilai IKPA < 70

Berdasarkan Evaluasi Om-SPAN terkait Nilai IKPA posisi per Desember 2024 nilai IKPA Badan Kebijakan Transportasi Akhir Triwulan IV TA 2024 sebesar (97,41) berada dalam kategori Sangat Baik. Dengan rincian 4 satker dengan kriteria Sangat Baik yaitu Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda sebesar (100,00), Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebesar (98,24), Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar (97,76), Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar (96,36) dan 1 Satker dengan kriteria Baik

yaitu Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan sebesar (93,13).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	02211	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Nilai	100.00	88.51	96.71	100.00	98.95	98.97	100.00	97.41	100%	0.00	97.41
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.28	19.34	10.00	9.90	9.90	25.00				
			Nilai Aspek	94.26		98.66				100.00				

Gambar 2. 4 Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di sektor publik, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik. Melalui jalur beasiswa dan diklat, Badan Kebijakan Transportasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor transportasi. Pengembangan kompetensi SDM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta, bahwa peningkatan kualifikasi talenta dilaksanakan melalui tugas belajar. Pengembangan kompetensi ASN selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sampai dengan bulan Desember 2024, sebanyak 14 (empat belas) pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi telah mengajukan permohonan tugas belajar. Adapun kedudukan pegawai dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kedudukan Pegawai yang Mengajukan Permohonan Tugas Belajar

No	Status	Pembiayaan	Penempatan	Jumlah
1	Diberhentikan dari Jabatannya	Beasiswa	Ditempatkan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	3
2	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Beasiswa	Unit kerja asal	2
3	Diberhentikan dari Jabatannya	Mandiri	-	-
4	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Mandiri	Unit kerja asal	9

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pemberian tugas belajar sampai dengan Semester II Tahun 2024, tercatat sebanyak 23 (dua puluh tiga) pegawai Badan Kebijakan Transportasi sedang melaksanakan tugas belajar sebagaimana tercantum pada rincian berikut:

Tabel 3. 2 Kedudukan Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar

No	Status	Pembiayaan	Penempatan	Jumlah
1	Diberhentikan dari Jabatannya	Beasiswa	Ditempatkan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	9

No	Status	Pembiayaan	Penempatan	Jumlah
2	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Beasiswa	Unit kerja asal	2
3	Diberhentikan dari Jabatannya	Mandiri	-	-
4	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Mandiri	Unit kerja asal	12

Tabel 3. 3 Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Status Tugas Belajar Tahun 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan yang Ditempuh	Unit Kerja	Tahun Kuliah	Perkiraan Lulus Kuliah	Keterangan
1	Anggun Pitaloka, S.M	Pranata Keuangan APBN Mahir	S-2/ Pascasarjana Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen IMMI	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	06-03-2023	07-03-2025	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
2	Nadia Milla Hanifah, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2/Magister Teknik Sipil - UI	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28-08-2023	27-08-2025	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
3	Agus Kharir Andriana	Pengadministrasi Perkantoran	S-1 / Teknik Informatika - Universitas Esa Unggul	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28-02-2024	30-09-2024	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
4	Asti Dian Hapsari	Pranata Humas Penyelia	S1 Ilmu Komunikasi – Universitas Paramadina	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	07-Okt-2024	07-Okt-2026	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
5	Dea Merta Moriska, S.Stat	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2/ Double Degree Magister Teknik Sipil - UI & University of Leeds	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	08-08-2022	28-02-2025	TB Beasiswa BPSPDM dibebastugaskan
6	Zakiatul Annisa	Pengelola Keuangan	Master of Public Administration	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	08-07-2024	25-05-26	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
7	Moh Iqbal Wildanul Wahid	Analisis Kebijakan Pertama	S2 Manajemen Transportasi – ITL Trisakti	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	14-10-2024	14-10-2026	TB Beasiswa tidak dibebastugaskan
8	Muhammad Rizal	Penelaah Teknis Kebijakan	S1 Manajemen	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	29-04-2024	29-04-2028	TB Mandiri tidak dibebastugaskan

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan yang Ditempuh	Unit Kerja	Tahun Kuliah	Perkiraan Lulus Kuliah	Keterangan
9	Brian Nararya Nugraha, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2/ Double Degree Magister Teknik Sipil - UI & University of Leeds	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	08-08-2022	28-02-2025	TB Beassiwa BPSDM dibebastugaskan
10	Mohammad Afwan, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2 <i>Double Degree</i> /Magister Teknik Sipil – UI & <i>University of Leeds</i>	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	26-08-2023	28-02-2026	TB Beassiwa BPSDM dibebastugaskan
11	Edy Arianto, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2 <i>Double Degree</i> /Magister Teknik Sipil – UI & <i>University of Leeds</i>	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	26-08-2023	28-02-2026	TB Beassiwa BPSDM dibebastugaskan
12	Muhammad Irham, S.So	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2 / Magister Terapan Prodi Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi – STIP Jakarta	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	02-01-2024	02-01-2026	TB Beasiswa STIP tidak dibebastugaskan
13	Nunuj Nurdjannah, S.Si.,M.T	Analisis Kebijakan Madya	S-3/ Doktoral Ilmu Lingkungan - UI	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	2020	2024	TB Biaya Mandiri tidak dibebastugaskan
14	Bram Hertasing	Kepala Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan	Doktor Administrasi Publik	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	27-02-2023	01-02-27	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
15	Peransi Paskah Sihombing, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1/Ilmu Administrasi Negara – Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	02-10-2023	02-10-2025	TB Biaya Mandiri tidak dibebastugaskan
16	Abduh Khoir	Pengadministrasi Perkantoran	S-1/Ilmu Administrasi Negara - Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	12-06-2023	30-06-2025	TB Biaya Mandiri tidak dibebastugaskan
17	Friska Miftakhul Ilmi	Statistisi Pertama	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	12-08-2024	31-07-2026	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
18	Grace Makella	Analisis Kebijakan Pertama	S1 Manajemen – Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	04-11-2024	04-11-2026	TB Mandiri tidak dibebastugaskan

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan yang Ditempuh	Unit Kerja	Tahun Kuliah	Perkiraan Lulus Kuliah	Keterangan
19	Rizka Amalia, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2 <i>Double Degree</i> /Magister Teknik Sipil – UI & <i>University of Leeds</i>	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	26-08-2023	28-02-2026	TB Beasiswa BPSPM dibebastugaskan
20	Heru Novelianto	Pengolah Data dan Informasi	S-1 / Manajemen – Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	08-04-2024	08-04-2028	TB Biaya Mandiri Tidak dibebastugaskan
21	Indah Maryati	Penyusun Data dan Informasi	Master of Public Policy and Management	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	30-09-24	30-09-26	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
22	Grace Rumondang	Analisis Kebijakan Pertama	S2 Manajemen Transportasi – ITL Trisakti	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	04-11-2024	04-11-2026	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
23	Henriko Siahaan	Penelaah Teknis Kebijakan	S2 Manajemen Transportasi – ITL Trisakti	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	28-10-2024	28-10-2028	TB Mandiri tidak dibebastugaskan

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Badan Kebijakan Transportasi, diadakan berbagai pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis dan manajerial. Badan Kebijakan Transportasi telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan, baik pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan sendiri, maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di luar Badan Kebijakan Transportasi. Pada tahun 2024 ini, Badan Kebijakan Transportasi telah menyelenggarakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam 11 (sebelas) pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di luar Badan Kebijakan Transportasi seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 4 Pelatihan di Internal Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

No	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat <i>English for Business</i> Kampung Inggris	22 s.d 26 Januari 2024	25
2	Diklat <i>Remote Pilot Rating</i> SPUKTA Bekerja Sama dengan BP3 Curug	19 s.d 23 Februari 2024	20

No	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
3	Diklat Keudaraan Tingkat Sarjana Bekerja Sama dengan Poltekbang Surabaya	13 s.d 14 Maret 2024	30
4	Diklat <i>Legaslitve Drafting</i> Bekerja Sama dengan LPPIA UI	18 s.d 21 Maret 2024	19
5	Diklat <i>Contract Drafting</i> Bekerja Sama dengan LPPIA UI	25 s.d 28 Maret 2024	18
6	Diklat Komunikasi Persuasif Bekerja Sama dengan Biro Psikologi Psikodinamika	22 s.d 23 April 2024	24
7	Diklat dan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan Skema QRMO Bekerja Sama dengan WAY Academy	06 s.d 08 Mei 2024	19
8	Diklat <i>Regulatory Impact Assessment</i> Bekerja Sama dengan LPEM FEB UI	14 s.d 16 Mei 2024	17
9	Diklat <i>Safety Management System</i> Bekerja Sama dengan Politeknik Penerbangan Medan	26 Mei s.d 01 Juni 2024	20
10	Bimbingan Teknis <i>Marine Surveyor</i> Bekerja Sama dengan Biro Klasifikasi Indonesia	23 s.d 26 Juli 2024	20

Tabel 3. 5 Pelatihan di Luar Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

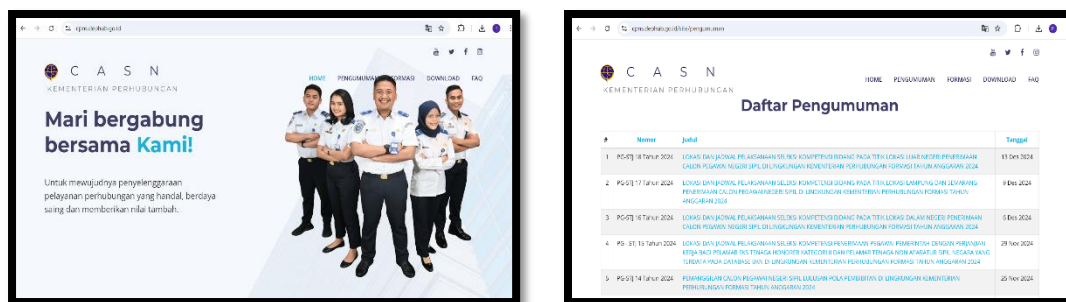
No	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Pelatihan Dasar CPNS	29 Januari s.d 13 September 2024	15
2	Diklat Pembangunan Karakter CPNS	04 Februari s.d 08 Maret 2024	15
3	Diklat Jaringan Komputer PPSDMAP Bekerja Sama dengan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi	22 s.d 26 April 2024	2
4	Diklat <i>Leadership and Sustainable and Entrepreneurial</i>	22 s.d 26 April 2024	6

No	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
	<i>Leadership</i> Program Batch I Biro SDMO		
5	Diklat <i>Leadership and Sustainable and Entrepreneurial Leadership</i> Program Batch II Biro SDMO	29 April s.d 03 Mei 2024	6
6	Diklat CGRE Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Bekerja Sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pehubungan	16 s.d 17 Mei 2024	1
7	Diklat PKA Angkatan XLV & XLVI Tahun 2024 PPSDMAP	24 Juni s.d 13 November 2024	3
8	Diklat PKP Angkatan XCVII & XCVIII Tahun 2024 PPSDMAP	01 Juli s.d 20 November 2024	2
9	Diklat PKN Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2024 PPSDMAP Bekerja Sama dengan LAN	02 Juli s.d 01 November 2024	1
10	Diklat JFT Arsiparis Terampil ANRI	07 Agustus s.d 20 November 2024	1
11	Diklat Manajemen Talenta/ DNA <i>Talent</i> PPSDMAP	12 s.d 14 Agustus 2024	2

Melalui jalur pendidikan dan pelatihan, Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Dengan mengikuti pedoman dari Kementerian PANRB, Badan Kebijakan Transportasi memastikan bahwa pengembangan SDM dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan sektor transportasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi serta mendukung pencapaian tujuan nasional dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

B. Pengadaan CASN (CPNS, Pola Pembibitan dan PPPK Tahun 2024)

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai serta melaksanakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan pegawai non ASN, maka sepanjang Tahun 2024 Kementerian Perhubungan telah melaksanakan rekrutmen/ pengadaan pegawai melalui beberapa jalur, yaitu pengadaan CPNS, pengangkatan CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan serta pengadaan PPPK.



Gambar 3. 1 Website CASN Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal tanggal 19 Agustus 2024 Nomor PG 11 Tahun 2024 tentang Pengadaan CPNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diketahui bahwa Kementerian Perhubungan membuka lowongan sebanyak 1.391 formasi CPNS yang terdiri dari 1.266 formasi umum, 49 formasi khusus lulusan terbaik/ cumlaude, 5 formasi khusus putra/putri Papua, 43 formasi khusus putra/ putri Kalimantan dan 28 formasi khusus disabilitas. Kemudian pengadaan pegawai melalui pengangkatan CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 ini sebanyak 2.505 formasi. Sedangkan pada pengadaan PPPK Tahun 2024 dalam rangka pengelolaan Pegawai Non ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berdasarkan Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal tanggal 30 September 2024 Nomor PG-SKJ 28 Tahun 2024 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024 dapat diketahui bahwa telah dibuka 16.345 formasi PPPK yang dikhususkan bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan data pengadaan pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 tersebut, Badan Kebijakan Transportasi mendapat 13 formasi CPNS yang terdiri dari 9 formasi umum, 2 formasi khusus lulusan terbaik/ cumlaude, 1 formasi khusus putra/ putri Kalimantan dan 1 formasi khusus disabilitas. Kemudian 10 formasi CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan dan 46 formasi PPPK.

Sampai dengan akhir Desember 2024, proses seleksi pengadaan CPNS dan PPPK masih berlangsung, dimana pada seleksi pengadaan CPNS telah sampai tahap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sedangkan pada seleksi pengadaan PPPK telah sampai tahap Seleksi Kompetensi PPPK yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural serta wawancara.

Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS dan PPPK dapat diketahui bahwa pegawai baru hasil dari seleksi pengadaan CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024 akan mulai bergabung bersama Badan Kebijakan Transportasi kurang lebih pada Semester Pertama Tahun 2025. Sedangkan pegawai baru dari formasi CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan saat ini telah bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebanyak 5 pegawai dan 5 pegawai lainnya masih menunggu penetapan formasi lebih lanjut.

BAB IV KEGIATAN STRATEGIS

A. Glorifikasi Sektor Transportasi Darat

Tema Seminar/ Glorifikasi Sektor Transportasi Darat yaitu “Sistem Transportasi Darat Indonesia yang Terintegrasi, cerdas, dan Berkelanjutan : Sudahkan menghubungkan Indonesia?” Seminar ini merupakan bentuk kolaborasi / kerjasama antara Kementerian Perhubungan (Badan Kebijakan Transportasi dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Institut Universitas Indonesia (UI) dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja sub sektor transportasi darat. Seminar ini menyajikan diskusi lintas stakeholder tentang isu dan potensi strategis transportasi darat menghadapi tantangan ke depan pembangunan sistem transportasi, terintegrasi, cerdas dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 10 Oktober 2024 bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kampus UI serta dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan RI.

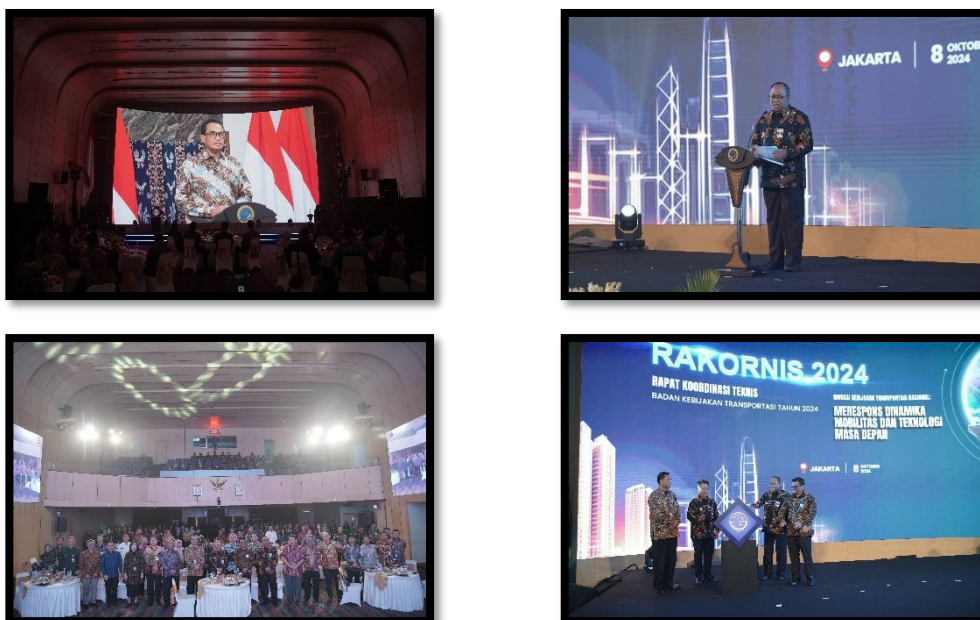


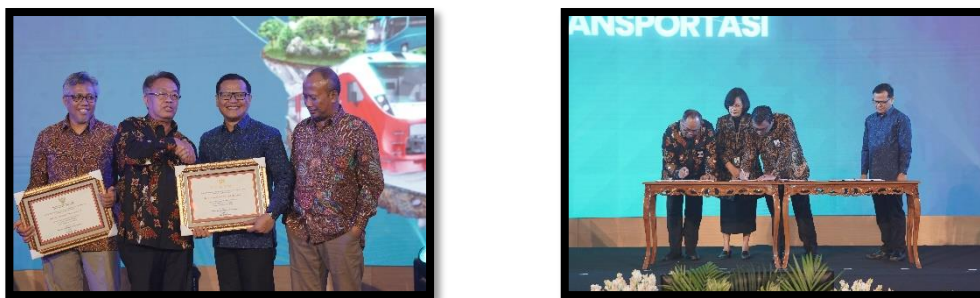


Gambar 4. 1 Dokumentasi Glorifikasi Sektor Transportasi Darat

B. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Badan Kebijakan Transportasi

Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis yang bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana dan usulan dari subsektor, stakeholder dan pemerintah daerah, dengan berlandaskan pada isu-isu strategis sektor transportasi serta sinkronisasi kinerja antar subsektor Kementerian Perhubungan untuk mendukung kebijakan transportasi nasional. Kegiatan ini akan dimulai dengan dialog kinerja yang melibatkan narasumber dari Bappenas, Kemenkomarvest dan Kemenpan RB. Agenda lain dalam RAKORNIS ini yaitu Peluncuran e-Library dan Seremonial MoU Kerjasama Badan Kebijakan Transportasi/ Kementerian Perhubungan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) serta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Tema dalam kegiatan ini yaitu **“Inovasi Kebijakan Transportasi Nasional : Merespons Dinamika Mobilitas dan Teknologi Masa Depan”**. Pelaksanaan RAKORNIS Badan Kebijakan Transportasi pada 8 Oktober 2024 bertempat di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan (Jl Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat). Bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI memberikan Sambutan dalam kegiatan RAKORNIS Badan Kebijakan Transportasi.





Gambar 4. 2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Teknis Badan Kebijakan Transportasi

C. Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum”

Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan judul "Evaluasi Kebijakan Standar pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum" bertempat di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan (Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Kota Jakarta Pusat) pada tanggal 17 Juli 2024. Aspek krusial yang dibahas pada kegiatan FGD tersebut adalah penentuan umur operasional kendaraan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam PM 29 tahun 2015 untuk angkutan dalam trayek dan PM 44 tahun 2019 untuk angkutan umum tidak dalam trayek.

Pelaksanaan kegiatan FGD melibatkan empat pembicara yang kompeten yaitu Direktur Angkutan Jalan, Direktur PT. Eka Sari Lorena Transport Tbk, Dr. Yayat Supriyatna (Pengamat Perkotaan), dan Dr. Eng. Sandro Mihradi (Akademisi ITB). Sedangkan bertindak sebagai pembahas yaitu Agus Pambagio, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara (KLHK), Kombes Pol Erwin Sinaga (Kemenkopolkum), Agus Sujatno (YLKI), Ateng Aryono (Sekjen DPP Organda) dan dipandu oleh Joni Gusmali (MTI) sebagai moderator serta dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan RI.

Dari kegiatan FGD tersebut dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Pembatasan usia operasional kendaraan bermotor umum disesuaikan dengan potensi risiko dan kondisi wilayah dimana kendaraan tersebut beroperasi;
2. Regulasi yang dihasilkan harus mampu memberikan kemudahan bagi operator maupun regulator untuk diimplementasikan, sehingga proses pengawasan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik;
3. Diperlukan insentif bagi pelaku usaha atau operator angkutan umum yang melakukan peremajaan terhadap kendaraan yang telah melewati umur operasional sebagaimana diterapkan dalam regulasi;
4. Regulasi terkait dengan pembatasan umur operasional kendaraan bermotor umum sebaiknya diterapkan pada kota metropolitan yang telah memiliki layanan angkutan umum dengan *demand/ load factor* yang

memadai sehingga tidak memberatkan operator angkutan umum ketika harus melakukan peremajaan kendaraan.



Gambar 4. 3 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) dengan judul "Evaluasi Kebijakan Standar pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum"

D. Expert Talk dengan tema “Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024”

Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan *Expert Talk* dengan tema “Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024” yang diselenggarakan pada Selasa, tanggal 24 September 2024 di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Badan Kebijakan Transportasi, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (ITB) serta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pelaksanaan *expert talk* bertujuan untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terkait capaian target sub-sektor transportasi udara selama 10 tahun terakhir. Hal ini tentunya sangat penting bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi Kementerian Perhubungan dalam perencanaan ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dan para Staf Ahli di Kementerian Perhubungan. Turut hadir sebagai narasumber pembicara yaitu Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim (Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia), Polana Banguningsih Pramesti (Dirut LPPNPI AirNav), Gerry Soejatman (Pengamat

Transportasi Udara) dan Tata Dirgantara (Dekan FTMD-ITB), serta penanggung jawab yaitu Garuda Indonesia, Kompas, Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) serta Ikatan Pilot Indonesia (IPI).

Dalam kegiatan ini dibahas bahwa sektor penerbangan Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Peningkatan jumlah penumpang, keselamatan dan pelayanan yang membaik serta kenaikan konektivitas mencerminkan *trend* yang cukup positif. Namun kolaborasi antara bisnis, regulasi, teknologi, kelembagaan dan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu di sektor penerbangan dan mendorong pertumbuhan ke depannya.



Gambar 4. 4 Dokumentasi *Expert Talk* dengan tema “Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024”

BAB V KETERLIBATAN STAKEHOLDER

A. Kerjasama Bilateral/ Regional/ Internasional/ Multilateral

Badan Kebijakan Transportasi terus berupaya mendorong inovasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif, adaptif dan menjawab kebutuhan masyarakat salah satunya melalui kolaborasi dengan mitra-mitra strategis baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi telah berkomitmen menjalin kerja sama dan bersinergi dengan empat mitra perguruan tinggi, satu mitra asosiasi dan satu mitra internasional dengan detail informasi kerja sama sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Januari 2024, bertempat di Bandung, Badan Kebijakan Transportasi bersama dengan Universitas Padjajaran menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi dengan jangka waktu kerja sama selama 5 tahun;
2. Pada tanggal 02 Februari 2024 Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Airlangga sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi dengan jangka waktu kerja sama 5 tahun;
3. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Sumatera Barat, Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Andalas sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi dengan jangka waktu kerja sama 5 tahun;
4. Badan Kebijakan Transportasi bersama dengan Universitas Diponegoro telah menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 07 Juni 2024 tentang Perumusan Kebijakan Dalam Pengembangan di Bidang Transportasi dengan jangka waktu kerja sama 5 tahun;
5. Pada tanggal 08 Oktober 2024 Badan Kebijakan Transportasi dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) telah menyepakati Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi dalam jangka waktu 5 tahun;
6. Dalam rangka meningkatkan rekomendasi kebijakan pada keselamatan transportasi jalan, Badan Kebijakan Transportasi dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian tentang Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Keselamatan Jalan pada tanggal 23 Oktober 2024.

BAB VI PENUTUP

- A. Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit kerja Eselon II, yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Pusat Kebijakan Prasarana dan Integrasi Moda, Pusat Kebijakan Lalu-Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan, dan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Kebijakan Transportasi;
- B. Adapun jumlah SDM Badan Kebijakan Transportasi sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024 tercatat sebanyak 284 pegawai;
- C. Pada Tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi telah menyelesaikan sebanyak 64 Rekomendasi Kebijakan. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi. Secara umum, Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 telah mencapai target. Adapun rata-rata Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebesar 105,34%;
- D. Adapun realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 sebesar Rp 188.043.279.980 (95,72%) dari pagu total dan (99,40%) dari pagu efektif dengan rincian realisasi per jenis belanja adalah sebagai berikut: belanja barang sebesar Rp 139.746.630.921 (94,61%), belanja pegawai sebesar Rp41.488.904.048 (98,93%) dan belanja modal sebesar Rp6.807.745.011 (99,95%);
- E. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di sektor publik, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik. Melalui jalur beasiswa dan diklat, Badan Kebijakan Transportasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor transportasi. Hasil monitoring pelaksanaan pemberian tugas belajar sampai dengan Semester II Tahun 2024, tercatat sebanyak 23 (dua puluh tiga) pegawai Badan Kebijakan Transportasi sedang melaksanakan tugas belajar. Selain tugas belajar, pada tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi telah menyelenggarakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam 11 (sebelas) pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di luar Badan Kebijakan Transportasi atau diselenggarakan oleh instansi/ *stakeholder* lainnya;
- F. Berdasarkan data pengadaan pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 tersebut, Badan Kebijakan Transportasi mendapat 13 formasi CPNS yang terdiri dari 9 formasi umum, 2 formasi khusus lulusan terbaik/ cumlaude, 1 formasi khusus putra/ putri Kalimantan dan 1 formasi khusus disabilitas. Kemudian 10 formasi CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan dan 46 formasi PPPK;

- G. Kegiatan Strategis Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Glorifikasi Sektor Transportasi Darat yaitu “Sistem Transportasi Darat Indonesia yang Terintegrasi, cerdas, dan Berkelanjutan : Sudahkan menghubungkan Indonesia?”;
 - b. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Badan Kebijakan Transportasi dengan tema : “Inovasi Kebijakan Transportasi Nasional : Merespons Dinamika Mobilitas dan Teknologi Masa Depan”;
 - c. Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum”
 - d. Expert Talk dengan tema “Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024”
- H. Kerja sama Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2024 yaitu:
- a. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Padjajaran;
 - b. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Airlangga;
 - c. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Andalas;
 - d. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Diponegoro;
 - e. Badan Kebijakan Transportasi dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI);
 - f. Badan Kebijakan Transportasi dengan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS).